



## Badung Siapkan Rp 31 Miliar untuk Kantor Kejari di Mengwi



• DOK NUSABALI  
BUPATI Badung Nyoman Giri Prasta (kanan) didampingi Wabup Ketut Suiasa (tiga dari kanan) dan Sekda Kompyang R Swandika (dua dari kanan) saat meninjau lokasi yang akan dibangun kantor Kejari Badung, Agustus 2016 lalu.

MANGUPURA, NusaBali

Pemerintah Kabupaten Badung tengah menggeber rencana pembangunan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung. Seperti rencana awal, kantor kejari yang akan dibangun mandiri oleh Pemkab Badung ini berlokasi di kawasan Terminal Mengwi. Untuk biaya, pemkab menyiapkan anggaran sebesar Rp 31 miliar.

"Pembangunan kantor Kejari Badung sudah pasti menggunakan sebagian lahan Terminal Mengwi. Sekarang semua masih berproses," tutur Kepala Bagian Perlengkapan dan Perawatan Pemkab Badung I Wayan Puja, Selasa (31/1).

Menurutnya, Bupati I Nyoman Giri Prasta sudah memastikan akan memberikan

hibah tanah dan gedung untuk kejari di Badung. Luas lahannya sekitar 1 hektare. Selain untuk kantor Kejari Badung, Terminal Mengwi seluas 11 hektare itu juga akan dibagi lagi menjadi tempat pengujian kendaraan bermotor menggantikan tempat pengujian yang selama ini ada di wilayah Denpasar. "Terminal kan total luasnya sekitar 11 hektare. Kalau tidak salah nanti diambil untuk kantor kejari 1 hektare, dan tempat pengujian 5 hektare," ungkapnya.

Wayan Puja menambahkan, penghibahan tanah dan gedung ini harus ada persetujuan DPRD Badung. Sementara Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Badung Ida Bagus Surya Suamba mengakui bahwa pembangunan kantor Kejari Badung akan menggunakan sebagian lahan Terminal Mengwi.

Surya Suamba menyatakan saat ini masih menggodok rancangan gedung yang nanti akan dibangun. Mulai dari biaya hingga desain bangunan. Pihaknya juga mengaku harus berkonsultasi dengan

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang leading sector-nya Kejari Denpasar.

Adapun terkait dengan tender pihaknya menargetkan pada Februari ini. "Untuk tender target kami bulan Februari ini. Baru rencana ini ya," jelasnya. Disinggung mengenai anggaran, pejabat asal Tabanan ini menyebut sekitar Rp 31 miliar. Sumber dana berasal dari APBD Badung.

Bangunan gedung Kejari Badung yang sedang dirancang ini nanti akan memiliki tiga lantai. Lengkap dengan rumah dinas kajari dan pejabat setingkat kepala seksi (kasi).

Sekadar mengingatkan, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta telah melakukan peninjauan ke lokasi. Bupati didampingi Wabup Ketut Suiasa dan Sekda Badung Kompyang R Swandika, meninjau bersama pihak Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI Amir Yanto, didampingi Kajati Bali Adul Muni, dan Kajari Denpasar Erna Noormawati Widodo Putri pada Agustus 2016 lalu. **asa**

Edisi : Rabu, 1 Februari 2017

Hal : 2



## Polda Bali Klarifikasi Ketua DPRD Badung Belum Jadi Tersangka

DENPASAR, NusaBali  
Kabid Humas Polda Bali, AKBP Hengky Wijdaja, mengklarifikasi terkait status Ketua DPRD Badung 2015-2019, I Putu Parwata, yang sebelumnya disebut sudah menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengu-  
rusan izin kondotel di

wilayah Kuta Selatan. AKBP Hengky menyatakan status Putu Parwata belum resmi jadi tersangka. Menurut AKBP Hengky, penyidik Subdit IV Tipikor Polda Bali saat ini masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara pro

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

## Polda Bali Klarifikasi Ketua DPRD Badung...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

justitia agar sah demi hukum, terkait kasus Putu Parwata. "Ada 14 saksi yang diperiksa. Apabila pemeriksaan saksi selesai, kemungkinan besar statusnya dinaikkan menjadi tersangka," ujar AKBP Hengky di Denpasar, Selasa (31/1).

Sedangkan Kasubdit IV Tipikor Polda Bali, AKBP Wedana Jati, menyatakan penyidik sudah meningkatkan status perkara dugaan jual beli perizinan kondotel ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Menurut Wedana Jati, penyidik sudah memiliki 2 alat bukti untuk menaikkan status perkara ini. Namun, sampai saat ini status Parwata disebutkan masih sebagai saksi. "Belum (tersangka) dan masih saksi," papar Wedana Jati saat dihubungi NusaBali terpisah, Selasa kemarin.

Wedana Jati menambahkan, penyidik masih membutuhkan bukti penguat dari keterangan saksi dan ahli yang dirumuskan dalam gelar perkara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi permohonan gugatan pra-preradilan, apabila dalam perkara ini ada penetapan tersangka.

"Tunggu hasil gelar perkara dulu untuk menentukan statusnya. Kemungkinan akhir bulan Februari 2017 ini dilaksanakan gelar perkara untuk penetapan tersangka," tandas Wedana Jati, yang ketika dihubungi per telepon kemarin mengaku sedang berada di Jakarta.

Sebelumnya, Senin (30/1), Dir Reskrimsus Polda Bali, Kombes Kenedy, mengatakan Putu Parwata sudah jadi ter-

sangka kasus dugaan jual beli perizinan kondotel. Sebelum menetapkan Parwata sebagai tersangka, penyidik telah melakukan penyelidikan kasus ini selama 3 bulan.

"Sekarang (Parwata) sudah resmi jadi tersangka," ungkap Kombes Kenedy di Mapolda Bali, Jalan WR Supratman Denpasar.

Kombes Kenedy menyebutkan, dalam kasus yang terjadi tahun 2016 ini, Parwata diduga meminta sejumlah uang kepada salah satu pengusaha kondotel untuk memuluskan perizinannya di wilayah Kuta Selatan. Namun, setelah uang diterima, izin yang dijanjikan politisi PDIP ini tidak kunjung keluar.

Akibatnya, kata Kombes Kenedy, pengusaha kondotel tersebut merugi dan akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Bali. "Sekarang masih dilakukan pendalaman terkait kasus ini," papar Kombes Kenedy yang belum mau menyebut angka kerugian dalam dugaan penyalahgunaan wewenang terkait jual beli perizinan kondotel ini.

Informasi yang dihimpun NusaBali, kasus yang menjerat Parwata ini terjadi tahun 2014 lalu. Saat itu sebuah perusahaan properti akan membangun kondotel di wilayah Kuta Selatan, Badung. Direktur perusahaan berinisial CR lalu bertemu dengan Parwata yang saat itu masih menjadi anggota DPRD Badung.

Pertemuan tersebut membahas keinginan perusahaan yang berencana mencari izin prinsip untuk pembangunan kondotel. Parwata sendiri menyatakan kesiapannya

membantu. "Saat itu, Parwata menjanjikan akan membantu mencari izin prinsip yang diperlukan," ujar sumber di lapangan, Selasa kemarin.

Dalam pengurusan izin, pihak perusahaan melalui CR memberikan uang kepada Parwata. Total uang yang diduga diberikan untuk mengurus izin prinsip tersebut mencapai Rp 3,3 miliar. "Jadi, di awal sempat minta Rp 1 miliar. Lalu saat pengurusan hingga selesai sempat minta uang beberapa kali," imbuh sumber tersebut, Selasa kemarin.

Izin prinsip yang dijanjikan Parwata akhirnya selesai. Namun, masalah muncul akhir 2016 lalu setelah ada surat kaleng yang masuk ke meja Dit Reskrimsus Polda Bali yang mengungkap adanya jual beli izin tersebut. Beberapa pejabat perusahaan properti itu lalu dipanggil penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali untuk dimintai keterangan terkait dugaan jual beli perizinan.

Pemeriksaan juga dilakukan penyidik terhadap mantan direktur berinisial CR. "Jadi, pihak perusahaan ini tidak tahu masalah dan tiba-tiba diperiksa. Termasuk CR yang kini berada di LP Kerobokan (Kecamatan Kuta Utara, Badung) karena kena kasus penipuan cek kosong," katanya.

Sementara itu, Putu Parwata masih enggan berkomentar terkait kasus yang menimpanya. "Saya tidak mau berkomentar dulu," ujar Parwata yang juga Sekretaris DPC PDIP Badung 2015-2020 saat dihubungi NusaBali per telepon, Selasa kemarin. **rez,asa**

Edisi : Rabu, 1 Februari 2017

Hal : 1 dan 15